

## BAB IV

### DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

#### 4.1 Deskripsi Daerah Istimewa Yogyakarta

##### A. Letak Geografis dan Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang terletak dibagian selatan Pulau Jawa bagian tengah, dengan ibukota Kota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dibagian Utara, Kabupaten Purworejo di bagian barat, Kabupaten Wonogiri dibagian Timur, dan Samudera Hindia di bagian Selatan.

Gambar 4  
Wilayah Admistrasi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : Peta wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

<http://dppka.jogjaprov.go.id/peta-diy.html>

Secara geografis, berdasarkan data yang di peroleh dari BPS DIY tahun 2017 wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada  $8^{\circ} 30 - 7^{\circ} 20$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ} 40 - 111^{\circ} 0$  Bujur Timur, dengan total luas wilayah  $3.185,80 \text{ Km}^2$  atau

kurang lebih 0.15 % luas daratan Indonesia. Wilayah ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dan terbagi lagi menjadi 78 Kecamatan dan 438 Desa/Kelurahan, yaitu : (Badan Pusat Statistik DIY, Tahun 2017)

Tabel 9

Pembagian luas wilayah menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten / Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (KM <sup>2</sup> )	Persentase Luas Wilayah (%)
1	Kab. Bantul	Bantul	506,86	15,91
2	Kab. Gunungkidul	Wonosari	1.485,36	45,63
3	Kab. Kulonprogo	Wates	586,27	18,40
4	Kab. Sleman	Sleman	574,82	18,04
5	Kota Yogyakarta	-	32,50	1,02
DIY		Yogyakarta	3.185,50	100,00

Sumber : Data dan Informasi DISDIKPORA DIY Tahun 2017

Informasi yang diperoleh dari Badan Statistik DIY, dari 3.185,80 km<sup>2</sup> luas D.I. Yogyakarta, 33,05 % merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09 % Regosol, 12,38 % Lathosol, 10,97 % Grumusol, 10,84 % Mediteran, 3,19 % Alluvial, dan 2,48 % adalah tanah jenis Rensina. Sebagian besar wilayah Desa/Kelurahan di D.I. Yogyakarta terletak pada topografi Dataran yaitu tercatat sebesar 75,57 persen, pada topografi Lereng/Punggung Bukit sebesar 23,97 persen, dan sisanya sebesar 0,46 persen pada topografi Lembah/Daerah Aliran Sungai. (Badan Pusat Statistik DIY Tahun 2017)

D.I. Yogyakarta memiliki iklim tropis yang di pengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Menurut catatan BMKG, Stasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta, suhu udara rata-rata di DI Yogyakarta tahun 2017 adalah 26,15°C

lebih rendah dari tahun 2016 yaitu 26,7° C , dengan suhu minimum 25,1° C dan suhu maksimum 26,9° C. Intensitas hujan perbulan di DIY kurang lebih 212,00 mm<sup>3</sup> dengan hari hujan perbulan 14,67 kali. Sedangkan kelembaban udara tercatat antara 45,8 persen – 97,1 persen, tekanan udara antara 1.011,8 mb - 1.015,7 mb, dan kecepatan angin antara 0,7 knot sampai dengan 1,1 knot. (Badan Pusat Statistik DIY Tahun 2017)

### **B. Kondisi Demografis Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta 2010-2020, penduduk DIY tahun 2017 tercatat berjumlah 3.762.167 jiwa, dengan persentase penduduk laki-laki berjumlah 49,46 % dan penduduk perempuan berjumlah 50,54 %. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 ke tahun 2010 mencapai 1,17 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yang mencapai 1,18 %. Dengan luas wilayah sekita 3.185,80 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di DIY tercatat 1.181 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta yakni 13.007 jiwa per km<sup>2</sup> dengan luas wilayah hanya sekitar satu persen dari luas DIY. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki wilayah terluas mencapai 46,63 persen, namun hanya memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu rata-rata sekitar 491 jiwa per km<sup>2</sup>. (Badan Pusat Statistik DIY Tahun 2017)

Menurut angka proyeksi Penduduk 2010-2020, komposisi penduduk D.I. Yogyakarta menurut kelompok umur akan didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 25-29 tahun sebesar 8,49 persen. Sehingga sebagai salah satu upaya yang di lakukan oleh pemerintah adalah pemerataan penyebaran penduduk antar

wilayah di Indonesia, pemerintah melakukan transmigrasi penduduk. Jumlah transmigran dari DIY pada tahun 2017 tercatat sekitar 48 KK atau sebanyak 144 jiwa. Jumlah KK transmigran terbanyak berasal dari Kabupaten Kulonprogo yaitu 16 KK. (Badan Pusat Statistik DIY Tahun 2017)

Tabel 10  
Jumlah Penduduk pada Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	2010	2015	2017
1	Kulon Progo	389.661	412.198	421.295
2	Bantul	909.661	971.511	995.264
3	Gunung Kidul	677.376	715.282	729.364
4	Sleman	1.103.534	1.167.481	1.193.512
5	Kota Yogyakarta	387.379	412.704	422.732
	<b>Total DIY</b>	<b>3.467.489</b>	<b>3.679.176</b>	<b>3.762.167</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY Tahun 2017

Tabel 11  
Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Menurut Jenisnya di Kab/Kota DIY Tahun 2017

Kab/Kota	Tuna Netra	Bisu / Tuli	Cacat Tubuh	Cacat Mental	Penyakit Kronis	Ganda
Kulon Progo	404	368	1.730	1.666	217	228
Bantul	487	428	1.580	1.970	180	386
Gn. Kidul	711	621	2.126	2.033	331	429
Sleman	396	439	1.160	1.806	239	258
Yogyakarta	125	100	328	505	139	66
<b>Total 2017</b>	<b>2.123</b>	<b>1.956</b>	<b>6.924</b>	<b>7.980</b>	<b>1.106</b>	<b>1.367</b>
<b>2016</b>	<b>2.198</b>	<b>2.249</b>	<b>7.552</b>	<b>9.588</b>	<b>1.055</b>	<b>1.796</b>
<b>2015</b>	<b>2.758</b>	<b>2.629</b>	<b>7.895</b>	<b>7.403</b>	<b>1.373</b>	<b>1.297</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY Tahun 2017

### **C. Kondisi Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Secara nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta Pada jenjang Sekolah Dasar dan MI baik negeri maupun swasta pada tahun 2017 di D.I. Yogyakarta terdapat 2.014 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 313.852 anak dan diasuh oleh 21.543 guru. Untuk jenjang pendidikan SMP dan MTs baik negeri dan swasta tercatat sebanyak 540 sekolah dengan 156.093 murid yang diasuh oleh 12.158 orang guru. (Badan Pusat Statistik DIY Tahun 2017)

Pada jenjang SMA dan MA baik negeri maupun swasta, tercatat sebanyak 216 sekolah dengan 6.894 orang guru yang mengajar 72.087 siswa. Adapun untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan terdapat 218 unit sekolah dengan 87.436 siswa yang diasuh oleh 8.374 orang guru. Pada jenjang perguruan tinggi negeri, D.I. Yogyakarta memiliki 11 perguruan tinggi, dengan jumlah mahasiswa keseluruhan sebanyak 127.183 orang, diantaranya 38,79 persen adalah mahasiswa UGM, dan 21,77 persen mahasiswa UNY. Adapun perguruan tinggi swasta (PTS) tercatat sebanyak 107, dengan rincian sebanyak 21 universitas, 35 sekolah tinggi, 5 institut, 39 akademi dan 6 politeknik. Didalamnya tergabung mahasiswa sebanyak 42.284 orang yang diasuh oleh 6.198 orang dosen tetap. (Badan Pusat Statistik DIY Tahun 2017)

Tabel 12  
Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta, Murid, dan Guru di Daerah Istimewa  
Yogyakarta Tahun 2017

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
SD/ MI	2.014	313.852	21.543
SMP / MTS	540	156.093	12.158
SMA / MA	216	72.087	6.894
SMK	218	87.436	8.374
PT	118	169.471	6.198

Sumber : [www.pendidikan-diy.go.id](http://www.pendidikan-diy.go.id)

Tabel 13  
Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017

Kab / Kota	Tidak Sekolah	Belum Tamat SD/MI	Tamat SD/MI	SMP/ MTS	SMA/SMK /MA
Kulon Progo	83.466	42.932	100.673	71.708	119.119
Bantul	176.459	71.699	203.062	136.978	253.552
Gn Kidul	190.832	68.353	212.484	144.332	116.606
Sleman	173.336	109.393	142.419	137.013	329.556
Kota Yogyakarta	53.627	44.628	43.318	52.478	124.931

Sumber : [Jogjaprovo.go.id](http://Jogjaprovo.go.id)

Tabel 14  
Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017

Kab/Kota	Dip I/II	Dip III	Dip IV/ S-1	S-2	S-3
Kulon Progo	2.682	6.512	18.118	772	46
Bantul	7.110	19.169	54.434	4.370	348
Gn Kidul	3.870	5.099	14.592	875	126
Sleman	9.809	33.776	97.672	11.752	1.891
Kota Yogyakarta	3.362	20.117	61.101	6.567	792

Sumber : [Jogjaprovo.go.id](http://Jogjaprovo.go.id)

#### **D. Perkembangan Pendidikan Inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pendidikan inklusif adalah suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun normal agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan kehidupannya. Sekolah inklusi berusaha untuk mengatasi masalah pemerataan kesempatan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus supaya bisa belajar di sekolah reguler. Sebagai pembaharuan pendidikan, pendidikan inklusif lahir karena banyaknya anak berkebutuhan khusus yang semakin bertambah dan akses pendidikannya terbatas, karena lokasi SLB pada umumnya berada di Ibu Kota Kabupaten. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten tetapi hampir di seluruh daerah (kecamatan/desa). (Direktorat PLB, 2003 : i)

Akibatnya, sebagian anak berkebutuhan khusus, karena faktor ekonomi terpaksa tidak disekolahkan oleh orang tuanya karena lokasi SLB jauh dari rumah, sedangkan SD terdekat tidak bisa menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di SD terdekat, namun karena ketiadaan pelayanan khusus bagi mereka, akibatnya mereka berpotensi tinggal kelas yang pada akhirnya akan putus sekolah. (Direktorat PLB, 2003 : ii)

Negara menjamin penyelenggaraan pendidikan inklusi melalui UUD 1945 pasal 31 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

*Ayat 1 : “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”*

*Ayat 2 : “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun”*

Berdasarkan ayat diatas semua daerah diwajibkan untuk mendukung tujuan tersebut, sehingga DIY yang merupakan bagian dari NKRI juga memiliki andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan cara dikeluarkannya Peraturan Daerah DIY No 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, setahun kemudian di keluarkannya Peraturan Gubernur No 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, sehingga dengan peraturan tersebut sebagian besar sekolah yang ada di DIY mulai menerima siswa disabilitas untuk dapat bersekolah bersama-sama dengan anak reguler lainnya.

Peningkatan penyelenggaraan pendidikan bagi ABK di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu bagian dari Visi dan Misi Gubernur DIY yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2012-2017. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan bagi ABK juga mempertimbangkan banyaknya jumlah penyandang disabilitas dalam usia sekolah, di DIY 3507 ABK usia sekolah terbagi dalam tiga kelompok usia yaitu



dari 737 (21%) ABK berusia 0-5 tahun, 1.227 (35%) ABK berusia 6-12 tahun dan 1.543 (44%) berusia 13-18 tahun. (RPJMD DIY Tahun 2012-2017)

Sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur tersebut semua sekolah di semua jenjang pendidikan sudah memiliki kewajiban untuk menerima peserta didik disabilitas apapun kondisinya, sehingga untuk tahun 2017/2018 Daerah Istimewa sudah memiliki sekitar 166 sekolah inklusi dan 26 diantaranya adalah sekolah tingkat SMA sederajat dapat dilihat pada Bab Latarbelakang. (Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun 2017).

Penyelenggaraan pendidikan inklusi menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah reguler, dan sudah terbukti peningkatan jumlah anak disabilitas yang mendaftar disekolah inklusi selalu meningkat setiap tahunnya, meskipun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki mulai dari fasilitas sekolah, kualitas guru dan sebagainya. Namun dapat dilihat saat ini pendidikan di DIY khususnya pendidikan inklusi sudah banyak melakukan pembenahan (Wawancara dengan Bapak Bachtiar, kabid PLB di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, pada tanggal 17 Desember 2018).

Perkembangan pendidikan inklusi di DIY sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal itu dapat dilihat dari semakin banyaknya anak disabilitas yang bersekolah dan jumlah sekolah reguler semakin banyak yang menerima siswa disabilitas. Hakikat pendidikan inklusi merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada anak penyandang disabilitas

dengan cara tidak membeda-bedakan antara anak penyandang disabilitas dan anak reguler. (Sudarto, 2016 : 2).

Dengan perkembangan pendidikan inklusi di Yogyakarta diharapkan mampu membekali ilmu pengetahuan dan ketrampilan peserta didik disabilitas agar dapat menjawab tantangan zaman dan merubah pola pikir masyarakat terhadap keberadaan anak disabilitas yang selama ini dipandang dari sisi negatif

#### **4.2 Profil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta**

- a. Dasar Hukum :** Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah DIY
- b. Kedudukan :** Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- c. Fungsi :** Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah dibidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah
- d. Tugas :**
  - 1. Penyusunan program dan pengendalian pendidikan, pemuda dan olahraga;
  - 2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;

3. Pelaksanaan kewenangan daerah yang berkaitan dengan pembiayaan, kurikulum, sarana prasarana, pendidik, dan tenaga pendidik, pengendalian mutu pendidikan, pemuda, dan olahraga;
  4. Pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang pendidikan;
  5. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
  6. Pemberian fasilitas penyelenggaraan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga Kabupaten/Kota;
  7. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja dibidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
  8. Pelaksanaan evaluasi pendidikan;
  9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya
- e. **Visi** : Mewujudkan kualitas pendidikan, pemuda, dan olahraga yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya
- f. **Misi** : Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY maka dirumuskan Misi yang difokuskan pada cara mengatasi lima isu strategis yang sudah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Misi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY tersebut adalah:
1. Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua dan nondiskriminatif
  2. Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya
  3. Mengembangkan pusat-pusat unggulan mutu pendidikan

4. Mengembangkan peran sinergis pendidikan terhadap pembangunan
5. Mengembangkan pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas dan berkarakter
6. Mengembangkan tata kelola pendidikan, pemuda, dan olahraga berbasis budaya

Keenam misi tersebut koheren dengan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 yakni: meningkatkan **Ketersediaan**, memperluas **Keterjangkauan**, meningkatkan **Kualitas**, mewujudkan **Kesetaraan**, dan menjamin **Kepastian** memperoleh layanan pendidikan yang mencakup persoalan aksesibilitas, kualitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian keberhasilan misi pembangunan pendidikan DIY yang mengakar pada kondisi daerah dipastikan memiliki andil pada pembangunan pendidikan nasional. Hal ini mencerminkan pemikiran dan tindakan yang kontekstual dengan kondisi lokal/daerah, kepentingan nasional, dan perkembangan global.

**g. Susunan organisasi**

1. Kepala Dinas
2. Secretariat
3. Bidang Perencanaan dan Standarisasi
4. Bidang PLB dan Dikdas
5. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi
6. Bidang Pendidikan Non-Formal dan Informal
7. UPTD ( 8 Balai, 9 SLB Negeri, 69 SMA Negeri, 49 SMK Negeri)
8. Jabatan Fungsional

**h. Ketenagaan Menurut Unit Kerja pada Dinas Pendidikan, Pemuda,  
dan Olahraga Tahun 2017**

1. Kepala Dinas	=	1 orang
2. Sekretariat	=	53 orang
3. Bidang Perencanaan dan Standarisasi	=	20 orang
4. Bidang PLB dan Dikdas	=	26 orang
5. Bidang Dikmenti	=	27 orang
6. Bidang PNFI	=	24 orang
7. Jabatan Fungsional	=	4 orang
8. UPTD		

Gambar 5

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



